

## BAB II

### *INEQUALITY* TERHADAP PEREMPUAN PADA MASA PEMERINTAHAN HOSNI MUBARAK

Dalam kehidupan masyarakat, peran kaum perempuan menjadi sebuah diskusi setiap negara akan hak-haknya. Perempuan menempati separuh populasi dunia dan perannya bagi kelangsungan hidup manusia sama besarnya dengan peran laki-laki di dunia. Secara alamiah, perempuan mengemban tugas terbesar bagi kelangsungan hidup manusia, seperti melahirkan dan mendidik anak. Dalam perspektif tentang perempuan, mereka harus dipandang sebagai manusia yang bermartabat agar terlihat bagaimana kesempurnaan perempuan serta seperti apa hak dan kebebasannya.<sup>40</sup>

Kaum perempuan berhak mendapatkan haknya tak terkecuali kaum perempuan di Mesir yang semestinya sama seperti kaum laki-laki yakni memiliki hak pribadi, hak dalam ekonomi, hak dalam kehidupan sosial-budaya, hak dalam berpolitik dan hak dalam hukum. Namun, pada masa pemerintahan Mubarak hak-hak tersebut belum sepenuhnya didapatkan oleh kaum perempuan. Oleh karena itu *disequality* muncul pada rezim Mubarak sebagai permasalahan kaum perempuan yang berada di Mesir. *Inequality* terhadap kaum perempuan Mesir muncul dalam

<sup>40</sup> *Hak dan Peranan Perempuan Dalam Masyarakat (Bagian Pertama)*. 18/07/13  
[http://indonesian.irib.ir/hidden-13/-/asset\\_publisher/8OQf/content/hak-dan-peranan-perempuan-dalam-masyarakat-bagian-pertama](http://indonesian.irib.ir/hidden-13/-/asset_publisher/8OQf/content/hak-dan-peranan-perempuan-dalam-masyarakat-bagian-pertama)

berbagai macam, seperti: <sup>41</sup> pertama, masalah ekonomi yang merupakan kepentingan setiap negara. Sedikitnya peluang kerja bagi perempuan membuat mereka menjadi tidak dapat mengasah keahlian dan kreativitas masing-masing. tiga periode pada masa pemerintahan Mubarak sudah terlihat adanya perbaikan bagi negara Mesir, tetapi untuk beberapa tahun selanjutnya terjadi adanya korupsi, kolusi, nepotisme serta tingkat pengangguran turut mempengaruhi kondisi ekonomi negara Mesir.

Kedua, munculnya kekerasan terhadap kaum perempuan dalam kehidupan sosial seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab baik dilakukan secara verbal hingga fisik. Hal tersebut terjadi karena perilaku kaum pria itu sendiri yang tidak bisa menghargai hak kaum perempuan, dimana perlakuan yang dilakukan tidak memandang kondisi, status, ataupun tempat. <sup>42</sup>

Ketiga, kondisi perempuan dalam hal politik yang memiliki keterbatasan yang mana terbatas dalam melakukan aktifitas politik dengan tidak bebas dalam mengeluarkan pendapat atau aspirasi untuk kemajuan Mesir. <sup>43</sup> Dalam hal ini kaum perempuan tidak dapat melakukan atau mendapatkan haknya sebagai warga negara Mesir karena pada masa pemerintahan Mubarak, kaum perempuan mendapatkan banyak perbedaan dan memiliki batasan-batasan dalam hal sosial,

---

<sup>41</sup> EKONOMI MEMBURUK, MUSUH UTAMA MUBARAK. Diakses pada 01/10/2013  
<http://www.antarantb.com/print/15255/ekonomi-memburuk-musuh-utama-mubarak>

<sup>42</sup> Dua Tahun Pasca-Revolusi Mesir, Perempuan Mesir Masih dalam Keterpurukan Seperti pada Era Mubarak. Di akses pada 01/10/2013  
<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/02/01/48840/>

<sup>43</sup> Mencari Kekuasaan Politik-Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon. Diakses 01/10/2013  
[http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS\\_Egypt\\_Lebanon\\_Jordan.pdf](http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Egypt_Lebanon_Jordan.pdf)

ekonomi, maupun politik. Oleh hal tersebut, tidak adanya persamaan hak perempuan dengan laki-laki bukanlah masalah kecil, melainkan masalah nasional bahkan Internasional.<sup>44</sup> Dapat diketahui dari jumlah data seluruh penduduk yang berada di Mesir penulis memaparkan terdapat sekitar 83.688.164 jiwa yang kemudian terdapat perbandingan antara kaum laki-laki dan perempuan mencapai 1000 : 983.<sup>45</sup> Pada masa pemerintahan Mubarak, adanya disequality terhadap perempuan mencapai 50% dari keseluruhan kaum perempuan yang ada di Mesir dari bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya.

#### A. Hak-hak Perempuan menurut CEDAW

Hak-hak perempuan di Mesir sama seperti halnya hak yang dimiliki kaum perempuan lainnya. Kaum perempuan berhak untuk hidup dan memiliki kebebasan dalam melakukan berbagai hal, serta wajib untuk mendapatkan perlindungan dari pihak manapun agar hak-haknya terpenuhi, kaum perempuan juga berhak untuk dihormati karena kaum perempuan itu memiliki tugas dan berbagai peran dalam tugasnya. Dengan menyadari hal ini, pentingnya hak perempuan sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dapat diakui dan dijamin perlindungannya. Prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah ditetapkan secara universal oleh CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). Konvensi menetapkan persamaan hak

<sup>44</sup> *Perempuan Di Musim Semi Arab: Masalah Mereka Masalah Setiap Orang*. Di akses 25/06/2013  
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=30582&lan=ba&sp=0>

<sup>45</sup> *Perbandingan Jumlah Laki-laki : Perempuan (Total)*. Di akses 01/10/2013  
[http://statistik.ptkpt.net/\\_a.php?\\_a=penduduk\\_ratio&info1=4](http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=penduduk_ratio&info1=4)

untuk perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, di semua bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Dari sistem hukum tentang hak asasi manusia, maka dapat ditemukan jenis-jenis hak-hak perempuan yang dapat diketahui dan terdapat dalam sistem hukum. Jenis hak-hak perempuan antara lain :<sup>46</sup>

1. Hak Pribadi (personal)

Setiap personal memiliki hak untuk bebas, tak terkecuali pada kaum perempuan tanpa melihat perbedaan antara kaum laki-laki ataupun perempuan karena sesungguhnya setiap manusia dilahirkan dengan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kebebasan merupakan sebuah hak yang dimiliki setiap orang terutama pada kaum perempuan. Setiap orang berhak melakukan apapun tak terkecuali kaum perempuan dimana berhak untuk bepergian atau berpindah-pindah tempat, bebas untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat, bebas untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Segala tindakan dapat diperlukan untuk mendapatkan persamaan (hak) antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Hak-hak yang sama khususnya hak atas perempuan Mesir dimana mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat melakukan pekerjaan serta bebas dalam memilih pekerjaan apapun sesuai kemampuan masing-masing, berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan hasil yang dikerjakan dalam penilaian kualitas hasil kerja, hak atas jaminan sosial dalam berbagai hal, berhak memilih dan dipilih dalam kegiatan pemilu, serta

---

<sup>46</sup> *Pengertian, Macam dan Jenis Hak Asasi Manusia / HAM yang Berlaku Umum Global*. Diakses 01/10/2013 <http://organisasi.org/pengertian-macam-dan-jenis-hak-asasi-manusia-ham-yang-berlaku-umum-global-pelajaran-ilmu-ppkn-pmp-indonesia>

berhak memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Hal ini terdapat pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pasal 1-4 (Bagian 1)<sup>47</sup> dimana telah dipaparkan bahwa segala bentuk perbedaan, pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi hak dan kebebasan kaum perempuan di bidang sosial, ekonomi, politik telah dihapuskan untuk mencapai sebuah tujuan yakni kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

### 3. Hak-hak Perempuan Dalam Politik

Politik merupakan sebuah usaha untuk menentukan peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga negara untuk membawa masyarakatnya kearah kehidupan bersama yang harmonis. Filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (polity) yang terbaik. Didalam politik itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab dan hidup dalam suasana moral yang tinggi.<sup>48</sup> Sama seperti halnya dengan seorang pria, yang mana seorang perempuan juga memiliki hak untuk turut serta dalam aktivitas politik untuk dapat mengeluarkan pendapat atau memberikan aspirasinya agar mudah bergaul dengan masyarakat lainnya sehingga dapat hidup secara akrab dan harmonis antar sesama. Kaum

---

<sup>47</sup> Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), hal 3. Di akses 01/10/2013

[http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW\\_text\\_Bahasa.pdf](http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf)

<sup>48</sup> Prof. Miriam Budiharjo. *Edisi revisi: Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama. (Jakarta:2008), hal 14-15

perempuan memiliki hak-hak yang terkait dengan bidang politik yakni antara lain :

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
- b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
- c. Hak membuat organisasi politik
- d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dasar yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal-pasal yang terdapat CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang merupakan sebuah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.<sup>49</sup> Dalam kehidupan politik sebuah negara khususnya wajib bagi kaum perempuan mendapatkan persamaan (hak) dengan kaum laki-laki, seperti terdapat dalam pasal 7 bahwa kaum perempuan berhak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum, dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan dapat berpartisipasi dalam organisasi non pemerintah dan asosiasi yang berkenaan dengan kehidupan publik dan negara, serta berhak menduduki kursi parlemen tanpa ada batasan-batasan yang dapat memicu terjadinya kesenjangan sosial antara kaum laki-laki dan perempuan karena dalam aktivitas politik di pemerintahan Mesir pun mereka memiliki peran masing-masing dalam tugasnya.

---

<sup>49</sup> Hak - Hak Perempuan-Akbar Muzaqir. 18/07/13  
<http://akbannuzaqir.blogspot.com/2013/04/hak-hak-perempuan.html>

### 3. Hak-hak Perempuan Dalam Kehidupan Sosial-Budaya

Setiap manusia dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan berhak menentukan jalan hidupnya dengan caranya masing-masing sesuai dengan kemampuan setiap individu. Dalam kehidupan sosial-budaya kaum perempuan di Mesir berhak menentukan, memilih dan mendapatkan pelajaran yang berharga untuk mendapatkan pengalaman yang berarti dalam hidupnya, seperti dalam pasal 3 pada CEDAW<sup>50</sup> yang menyatakan bahwa setiap negara PBB yang menyetujui konvensi tersebut untuk membuat undang-undang dan memastikan perkembangan dengan tujuan untuk menjamin hak asasi terutama pada kaum perempuan dan kebebasan beragama atas dasar kesetaraan dengan kaum laki-laki. Hak-hak kaum perempuan bisa didapatkan dalam bidang pendidikan dimana kaum perempuan berhak mendapatkan bimbingan karir dan keterampilan dari usia dini sehingga dari ilmu yang diperoleh dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Mesir merupakan sebuah negara yang sebagian besar masyarakatnya muslim, mayoritas kaum perempuan di Mesir mengenakan hijab untuk menutupi aurat bahkan sebagian dari mereka ada yang mengenakan cadar. Kehidupan mereka sangat terbatas pada kepemimpinan Mubarak dimana kaum perempuan dinilai rendah karena menurutnya kodrat perempuan dibawah dan tidak setara dengan kaum laki-laki.

---

<sup>50</sup> CEDAW, hal 3. Di akses 01/10/2013  
[http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW\\_text\\_Bahasa.pdf](http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf)

#### 4. Hak-hak Perempuan Dalam Ekonomi

Di Mesir, kaum perempuan kerap mendapatkan kekerasan dan dinilai lemah dalam melakukan aktivitas apapun sehingga tidak ada pekerjaan yang memperbolehkan kaum perempuan Mesir untuk melakukan pekerjaan. Kebebasan dalam melakukan pekerjaan merupakan sebuah hak yang dimiliki kaum perempuan, mereka berhak melakukan kegiatan jual beli dimanapun serta mengadakan perjanjian kontrak ataupun melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing, karena hal itu akan sangat lebih baik dibandingkan dengan berdiam diri di rumah. Seperti yang telah dituliskan CEDAW<sup>51</sup> dalam pasal 11 yang menyatakan bahwa kaum perempuan memiliki hak untuk bekerja dan memiliki kesempatan kerja yang sama termasuk dalam penggunaan kriteria seleksi dalam bekerja, memiliki jaminan sosial dalam bekerja apabila sudah tidak memiliki kemampuan lagi dalam pekerjaannya, kebebasan dalam menentukan profesi sesuai dengan kemampuan bekerja, berhak mendapatkan upah yang sama sesuai dengan pekerjaannya dan berhak mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

#### 5. Hak-hak perempuan Dalam Hukum

Kaum perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan (hak) dimata hukum dimana secara khusus memiliki hak diperlakukan secara adil dimuka

---

<sup>51</sup> CEDAW, hal 5. Di akses 01/10/2013  
[http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW\\_text\\_Bahasa.pdf](http://cedaw-seasia.org/docs/indonesia/CEDAW_text_Bahasa.pdf)

hakim dan peradilan apabila mendapatkan sebuah masalah yang menyangkut perlindungan hukum. Hukum yang telah ditetapkan harus diberlakukan dengan baik serta kebijakan yang telah dibuat juga tidak diperkenankan untuk memandang status seseorang dalam pelaksanaannya dan kaum laki-laki maupun kaum perempuan wajib diberikan perlakuan yang sama dalam segala tingkatan prosedur di muka hakim dan peradilan.

## **B. Bentuk Disequality Terhadap Perempuan Pada Masa Pemerintahan Hosni Mubarak**

Hosni Mubarak merupakan presiden Mesir yang memiliki sistem kepemimpinan yang sangat otoriter. Rezim otoriter telah menguasai Mesir pada saat itu dan sistem politik yang ada yakni sistem semipresidensial multipartai. Secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri.<sup>52</sup> Namun, dalam prakteknya kekuasaan hanya terpusat pada presiden dan keterbatasan ruang gerak sangat dialami oleh kaum perempuan pada masa pemerintahannya dalam keseharian.<sup>53</sup>

Konstitusi Mesir era Mubarak telah menyatakan bahwa negara bersedia memberikan bantuan kepada kaum perempuan dalam biaya mengasuh anak dan menyeimbangkan tanggungjawab keluarga dan pekerjaan serta pada konstitusi 1971 mewajibkan kepada negara untuk memperlakukan perempuan dan laki-laki

<sup>52</sup> *Struktur perpolitikan mesir era hosni mubarak*. Di akses 01/10/2013

<http://bontem.blogspot.com/2012/02/struktur-perpolitikan-mesir-era-hosni.html>

<sup>53</sup> *Sistem Pemerintahan Dan Politik Negara-Negara Timur Tengah*. Di akses 24/06/2013

<http://semutuyet.blogspot.com/2012/06/sistem-pemerintahan-dan-politik-negara.html>

secara sama dalam “ranah politik, sosial-budaya, dan ekonomi” selama perlakuan tersebut tidak melanggar syariah dan melarang adanya diskriminasi gender.<sup>54</sup>

Namun yang terjadi pada masyarakat yang ada di Mesir adalah sebaliknya, kesenjangan sosial muncul akibat adanya *disequality* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mesir terutama pada kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Berikut bentuk-bentuk *disequality* yang dialami perempuan Mesir dalam berbagai bidang:

1) Dalam Bidang Ekonomi

Kepentingan nasional suatu negara yang paling mendesak untuk diperjuangkan yakni masalah ekonomi. Ekonomi Mesir sangat tergantung pada pertanian minyak bumi, ekspor, gas alam, dan pariwisata.<sup>55</sup> Tiga periode masa pemerintahan Mubarak telah sedikit membawa perubahan ekonomi. Dana Moneter Internasional (IMF) melaporkan bahwa Produk Domestik Bruto/nilai semua barang dan jasa yang diproduksi Mesir berdasarkan Perhitungan Pendapatan Negara meningkat empat kali lipat antara 1981-2006 dari US\$ 1.355 pada 1981 menjadi US\$ 2.525 pada 1991, US\$ 3.686 pada 2001 menjadi US\$ 4.535 pada 2006. Berdasarkan data tersebut dinilai bahwa seperempat abad terakhir setidaknya perekonomian di Mesir mengalami pertumbuhan sekitar 4-5% termasuk pada tahun 2009 yang tumbuh dengan nilai 4,7%. Setelah diverifikasi PDB Mesir meningkat 7% pertahun.

<sup>54</sup> *Konstitusi Baru Mesir: Perbedaannya dengan Versi Lama*. Di akses 12/10/2013

<http://www.voaindonesia.com/content/konstitusi-baru-mesir-perbedaannya-dengan-versi-lama/1572237.html>

<sup>55</sup> *MESIR*. 19/07/2013

<http://ydayuda.files.wordpress.com/2012/11/mesir-1.pdf>

Menurut catatan Bank Dunia, pada tahun 2009 tercatat sebesar US\$ 188 miliar, dengan penduduk sebanyak 83 juta jiwa. Pada saat itu populasi warga miskin di Mesir dinilai turun dari 22,9% pada tahun 1996 menjadi 16,7% pada tahun 2000 dan 14% pada tahun 2009. Tingkat pengangguran pada tahun 2008 tercatat 8,7% sedikit meningkat dari sebelumnya mencapai tingkat terendah yaitu 8,1% pada tahun 1999. Namun dalam 10 tahun terakhir ini angka pengangguran tertinggi pada tahun 1995, sebanyak 11,3%.<sup>56</sup> Namun, setelah beberapa tahun kemudian perekonomian Mesir mulai digerogoti kolusi, korupsi dan nepotisme. Hal ini juga dikemukakan oleh Bangsawan Inggris Lord Acton bahwa “Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut (mutlak) dipastikan korup secara absolut”. Kondisi ekonomi yang memburuk karena banyaknya pengangguran bukan hanya mempengaruhi stabilitas sosial dan politik, namun juga mengancam rezim yang sedang berkuasa.<sup>57</sup>

Di sisi lain dalam dunia kerja, kondisi perempuan yang terjadi pada masa pemerintahan Mubarak tidak diperkenankan untuk melakukan pekerjaan apabila mengenakan hijab sehingga kondisi ini menghambat aktifitas pekerjaan kaum perempuan yang memiliki keterbatasan dalam penampilan dengan kata lain kaum perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun dengan tidak menggunakan hijab. Bukan hanya itu, kondisi perempuan pada saat itu juga dinilai sedikit lapangan pekerjaan yang tersedia. Larangan memakai hijab dalam bekerja terdapat pada kaum perempuan yang bekerja sebagai jurnalis dan pembawa acara

---

<sup>56</sup> *Mengapa Mursi Gagal Memperbaiki Ekonomi Mesir?*. Di akses 05/09/2013  
<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/30/mengapa-mursi-gagal-memperbaiki-ekonomi-mesir/>

<sup>57</sup> *Ekonomi Memburuk, Musuh Utama Mubarak*. Di akses 25/06/2013  
<http://www.antaraneews.com/print/245140/ekonomi-memburuk-musuh-utama-mubarak>

televisi. Hal ini terjadi karena Menurut Mubarak, di khawatirkan pembawa acara pada program televisi itu terutama kaum perempuan yang mengenakan hijab akan menyebarkan gerakan jilbab kepada masyarakat.<sup>58</sup> Bahkan dalam mengenakan hijab pada rezim Mubarak bukanlah sebuah kewajiban bahkan tidak diperkenankan bagi kaum perempuan yang bekerja di beberapa lembaga, seperti stasiun televisi dan maskapai penerbangan nasional.

## 2) Dalam Bidang Politik

Dalam aktivitas politik, kaum perempuan sama seperti kaum laki-laki yang bebas untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam melakukan sebuah pemilu. Kaum perempuan juga berhak memilih atau bahkan dipilih dalam sebuah pemilu. Uni Antar Parlemen melaporkan bahwa jumlah rata-rata perempuan di dunia yang dapat menduduki kursi parlemen hanya 19,5%. Laporan itu menyebutkan dunia Arab memiliki rata-rata paling rendah di dunia yaitu 10% dan jumlah kaum perempuan masih sama sejak tahun 2005 sebanyak 7%.

Di Mesir pada masa pemerintahan Mubarak kaum perempuan memiliki kesempatan yang sangat minim dalam melakukan aktifitas politik. Dalam pemilihan parlemen Mesir memperebutkan 508 kursi dimana 64 kursi disediakan secara khusus untuk caleg perempuan. Sistem kuota yang diberikan oleh pemerintah Mesir, telah diterapkan pada tahun 1979 yang kemudian pada 1980 dinyatakan tidak konstitusional, namun pada masa pemerintahan Mubarak

---

<sup>58</sup> *Mursi Izinkan Presenter Berjilbab di Mesir*. Di akses 13/06/2013  
<http://infoberitamedia.blogspot.com/2013/03/mursi-izinkan-presenter-berjilbab-di.html>

sistem kuota untuk anggota parlemen perempuan kembali diberlakukan dan hanya 8 anggota parlemen perempuan dimana 3 diantaranya melalui pemilu serta 5 orang lainnya ditunjuk oleh Presiden Mubarak.<sup>59</sup> Adapun kaum perempuan dalam aktivitas politik, yang dapat melakukan hanya pada kalangan menengah atas yang mana berasal dari keluarga yang beraktifitas dalam dunia politik, seperti Gamila Ismail yang merupakan salah satu anggota parlemen dan istri dari Ayman Nour seorang mantan pengacara yang pernah menjabat sebagai wakil Ketua Partai Ghad yang dikenal dengan pendobrak utama politik pada rezim Mubarak,<sup>60</sup> kemudian Dewan Nasional untuk Perempuan (*National Council of Women*) adalah organisasi pemerintah yang melakukan pemberdayaan sosial, politik, dan ekonomi perempuan secara umum yang di pimpin oleh Ibu Negara Suzanne Mubarak merupakan istri dari Hosni Mubarak yang telah berhasil membantu mengatasi dua isu penting yakni meningkatkan usia minimal untuk menikah menjadi 18 tahun dan memberikan hukuman pidana apabila terjadi khitan perempuan.<sup>61</sup>

Namun dalam aktifitas politik, kaum perempuan bukan dilihat sebagai anggota yang penting bahkan kegiatan yang dilakukan itu pun hanya sebatas tindakan amal dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dikemukakan sebuah fakta bahwa kaum perempuan hak politik dan kewarganegaraannya telah dijamin dalam UUD 1956. Namun, yang terjadi

---

<sup>59</sup> *Peluang Perempuan di Pemilihan Parlemen Mesir*. Di akses 01/10/2013  
<http://www.dw.de/peluang-perempuan-di-pemilihan-parlemen-mesir/a-6268128>

<sup>60</sup> *Tiga Kandidat Terkuat Pengganti Mubarak*. 03/10/2013  
<http://www.antaraneews.com/print/244793/tiga-kandidat-terkuat-pengganti-mubarak>

<sup>61</sup> *Cerita tentang hak-hak perempuan Mesir*. Diakses 12/10/2013  
<http://www.commongroundnews.org/article.php?id=27593&lan=ba&sp=0>

ekonomi dan lingkungan sosial berjalan menentang hak politik kaum perempuan.<sup>62</sup>

### 3) Dalam Bidang Sosial-Budaya

Pada masa pemerintahan Mubarak, kondisi yang terjadi pada kaum perempuan terlihat tidak aman dikarenakan munculnya kekacauan ditengah masyarakat. Tokoh utama yang menjadi permasalahan yakni kaum perempuan. Mayoritas kaum perempuan di Mesir mendapatkan kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual. Bentuk pelecehan kaum laki-laki tidak bertanggung jawab itu dilakukan secara verbal bahkan fisik. Perlakuan dalam bentuk verbal terhadap kaum perempuan seperti berupa perkataan lisan yang tidak selayaknya diucapkan kaum laki-laki dan siulan menggoda yang membuat kaum perempuan merasa tidak nyaman akan perbuatan tersebut. Kemudian bentuk pelecehan secara fisik terhadap kaum perempuan seperti sentuhan yang dilakukan kaum laki-laki yang sifatnya merujuk ke arah seks. Hal ini dilakukan di tempat umum kepada semua kaum perempuan yang melintas di sekitar jalan tempat mereka berada. Bahkan pelecehan tersebut dilakukan kepada kaum perempuan yang mengenakan hijab bahkan niqab (sehelai kain yang menutupi wajah. Hal ini dilakukan oleh kaum laki-laki secara individual bahkan ada pula yang berkelompok yang tidak diketahui darimana mereka berasal. Perempuan Mesir juga tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor, sangat jarang sekali kaum perempuan bahkan tidak akan menemukan kaum perempuan mengendarai kendaraan

---

<sup>62</sup> Mencari Kekuasaan Politik —Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon. Di akses 25/06/2013  
[http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS\\_Egypt\\_Libanon\\_Jordan.pdf](http://www.idea.int/publications/wip/upload/CS_Egypt_Libanon_Jordan.pdf)

bermotor. Kebijakan yang di berikan oleh Presiden Hosni Mubarak menunjukkan bahwa memang peran kaum perempuan sangat minim dalam melakukan berbagai pekerjaan yang berada di luar rumah. Banyaknya perilaku pelecehan seksual juga semakin membuat kaum perempuan merasa resah serta terjadinya tindakan pemerkosaan jika ada perlawanan dari kaum perempuan yang berusaha ingin melindungi dirinya.